

PARADIGMA DAKWAH STRUKTURAL: GERAKAN ANTI POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PILKADES OLEH MASYARAKAT DESA GERLANG BATANG DARI ERA KE ERA

Shochifah Diyah Puspitasari¹, Nida Nadia Zakiyyatunnisa²

¹Alumni Universitas Diponegoro Semarang

²UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹ifahshochifah@gmail.com

²nidanadiazakiya@gmail.com

Received 04/21/2026

Revised 05/04/2026

Accepted 05/23/2026

License:

Copyright (c) 2026

Shochifah Diyah Puspitasari,

Nida Nadia Zakiyyatunnisa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding E-Mail:

ifahshochifah@gmail.com

To cite this Article: Citation using APA Style 7th edition format

To link to this Article (DOI):

<https://doi.org/10.28918/manjadda.v1i1.14893>

Abstract

This study aims to explore the phenomenon of community resistance against money politics in the village head election (pilkades) of Gerlang Village, Batang Regency. Despite the persistence of money politics in local political culture across Indonesia, the people of Gerlang demonstrate strong moral and social resistance to such practices. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis employs McCombs Agenda-Setting Theory to explain how the moral issue of rejecting money politics became a salient public agenda, intertwined with the role of Islamic preaching (dakwah) as a moral communication medium at the local level. The findings reveal that resistance emerged through moral persuasion, religious communication, and continuous social interaction, where religious leaders acted as opinion builders (agenda setters). The synergy between face-to-face dakwah and digital communication via village social media groups strengthened public awareness grounded in religious values, social ethics, and political accountability. This study concludes that moral communication serves as an effective instrument to foster ethical political consciousness and social integrity within grassroots communities.

Keywords: Money Politics, Social Resistance, Da'wa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena resistensi masyarakat Desa Gerlang, Kabupaten Batang, terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Meskipun politik uang masih menjadi budaya politik yang mengakar di banyak daerah, masyarakat Gerlang menunjukkan penolakan moral dan sosial yang kuat terhadap praktik tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori Agenda-Setting dari McCombs untuk menjelaskan bagaimana isu moral “menolak politik uang” menjadi agenda sosial yang menonjol dalam kesadaran publik, serta dikaitkan dengan fungsi dakwah sebagai media

	komunikasi moral di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terbentuk melalui proses komunikasi dakwah, penyadaran moral, dan interaksi sosial yang berulang, di mana tokoh agama berperan sebagai pembentuk opini publik (agenda setters). Sinergi antara dakwah tatap muka dan media sosial desa memperkuat pembentukan opini publik yang berbasis nilai agama, etika sosial, dan tanggung jawab politik. Penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan komunikasi moral dapat menjadi instrumen efektif dalam menumbuhkan kesadaran politik yang bersih dan berkeadaban di tingkat akar rumput. Kata Kunci: Politik Uang, Resistensi Sosial, Dakwah
--	--

PENDAHULUAN

Praktik politik uang masih menjadi fenomena yang mengakar dalam dinamika politik lokal di Indonesia. Burhanuddin Muhtadi melalui CNN Indonesia (29/11/2023), bahkan menyampaikan bahwa politik uang di Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, dan hanya kalah dari dua Negara di Afrika, yakni Uganda dan Benin (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129203437-32-1030744/pakar-politik-uang-di-indonesia-tertinggi-ketiga-di-dunia>). Tingginya prevalensi tersebut menunjukkan bahwa politik uang bukan lagi sekadar pelanggaran insidental, melainkan telah menjadi pola yang “menginstitusi” dalam proses pemilu. Kondisi ini menandai tentang bagaimana masih lemahnya budaya politik berorientasi rasionalitas pemilih serta efektivitas pengawasan terhadap praktik-praktik transaksional dalam iklim demokrasi Negeri ini. Akibatnya, kontestasi politik kerap kali lebih ditentukan oleh kemampuan distribusi sumber daya material daripada pertarungan gagasan, rekam jejak, dan kualitas kepemimpinan para kandidat.

Lebih lanjut pada tahun 2024 Berdasarkan keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 terdapat 31 perkara yang berkaitan dengan politik uang yang telah ditangani melalui proses pemeriksaan etik terhadap penyelenggara pemilu. DKPP menegaskan bahwa politik uang merupakan persoalan serius yang mengancam kualitas demokrasi sehingga penanganannya tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan etika untuk membangun integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Meskipun DKPP tidak memiliki kewenangan mengadili tindak pidana politik uang secara langsung, lembaga ini berwenang menilai apakah KPU dan Bawaslu telah menjalankan tugasnya secara profesional dan berkeadilan dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut (<https://dkpp.go.id/dkpp-tangani-31-perkara-politik-uang-selama-pemilu-dan-pilkada-2024/>).

Dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk di tingkatan dasar seperti pemilihan kepala desa, praktik politik uang berkembang pesat, karena masyarakat

menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak menyadari risiko yang ada. Mereka membiarkan situasi ini karena tidak merasa bahwa politik uang adalah tindakan yang seharusnya dihindari. Penelitian yang dilakukan oleh Nico L. Kana di Kecamatan Suruh, misalnya, menunjukkan bahwa pemberian uang dalam konteks politik telah menjadi hal yang umum pada setiap pemilihan kepala desa sebelumnya, dan oleh warga setempat, hal ini dianggap sebagai simbol tali asih (Darma, 2022: 4).

Meski telah dilarang secara hukum, praktik ini tetap berlangsung dalam berbagai skala, terutama pada pemilihan kepala desa (pilkades) yang sering kali melibatkan kedekatan sosial, ekonomi, dan kultural antara calon dan pemilih. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya persoalan hukum dan etika, tetapi juga merupakan persoalan komunikasi dan budaya politik yang kompleks (Arief & Gobel, 2022). Dalam konteks desa, uang sering dimaknai bukan hanya sebagai alat transaksi, melainkan simbol penghargaan, solidaritas, atau bahkan bentuk hubungan timbal balik yang dilegitimasi oleh kultur sosial.

Desa Gerlang di Kabupaten Batang menjadi salah satu contoh menarik dalam konteks ini. Meskipun sebagian wilayah di sekitarnya masih menunjukkan kecenderungan menerima politik uang sebagai praktik lumrah dalam kontestasi politik lokal, masyarakat Gerlang justru memperlihatkan fenomena resistensi terhadap praktik tersebut. Penolakan ini bukan muncul karena tekanan hukum semata, melainkan karena tumbuhnya kesadaran moral dan nilai-nilai keagamaan yang kuat di tengah masyarakat. Proses resistensi tersebut berlangsung melalui komunikasi sosial, penyadaran keagamaan, dan pembentukan opini publik yang efektif.

Fenomena resistensi ini menunjukkan keterkaitan erat antara komunikasi massa, etika dakwah, dan pembentukan kesadaran politik masyarakat. Dalam konteks komunikasi, resistensi masyarakat terhadap politik uang dapat dipahami melalui teori Agenda-Setting McCombs yang menjelaskan bagaimana isu-isu tertentu menjadi penting di benak publik karena dibentuk oleh saluran komunikasi—baik media massa, tokoh masyarakat, maupun jaringan sosial lokal (Shaw & McCombs, 1977). Dalam konteks dakwah, resistensi ini menunjukkan keberhasilan nilai-nilai moral Islam yang ditransmisikan melalui komunikasi interpersonal, majelis taklim, khutbah Jumat, dan forum warga, sehingga menciptakan opini sosial yang menolak politik uang sebagai perilaku menyimpang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat Desa Gerlang membangun resistensi terhadap politik uang melalui komunikasi dakwah dan pembentukan agenda sosial di ruang publik lokal. Penelitian ini juga bertujuan menggambarkan faktor-faktor sosial, kultural, dan religius yang melandasi sikap kolektif masyarakat dalam menolak politik uang pada Pilkades, serta bagaimana proses komunikasi publik membentuk kesadaran politik yang etis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami proses sosial dan komunikasi yang melibatkan makna, nilai, serta interaksi antarindividu dalam konteks budaya tertentu (Creswell, 2015). Lokasi penelitian adalah Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga yang terlibat dalam Pilkades, serta dokumentasi berita dan catatan kegiatan sosial desa. Wawancara dilakukan terhadap delapan informan utama: dua tokoh agama, dua perangkat desa, dan empat warga dari kalangan berbeda (pemilih aktif, pemuda, dan ibu rumah tangga). Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode, memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten antara wawancara, observasi, dan dokumen (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Agenda-Setting

Teori Agenda-Setting pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972 melalui studi klasik mereka tentang pemilihan presiden Amerika Serikat. Teori ini menyatakan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat (*what to think*), tetapi berhasil menentukan isu apa yang harus dipikirkan (*what to think about*). Media berperan sebagai pembentuk agenda publik dengan cara menonjolkan isu-isu tertentu dan meminimalkan isu lainnya (McCombs & Shaw dalam Griffin et al., 2015).

Dalam konteks masyarakat pedesaan, fungsi “media” tidak selalu dijalankan oleh surat kabar atau televisi, tetapi sering kali oleh figur sosial seperti tokoh agama, kepala dusun, dan jaringan dakwah lokal. Mereka memainkan peran sebagai agenda setters yang menentukan isu apa yang dianggap penting oleh warga desa. Dalam kasus Desa Gerlang, resistensi terhadap politik uang dapat dipahami sebagai hasil dari pembentukan agenda moral dan sosial oleh tokoh dakwah yang menggeser perhatian masyarakat dari orientasi material ke orientasi etis dan spiritual.

Teori Agenda-Setting juga menjelaskan bahwa proses pembentukan agenda tidak bersifat linier, melainkan interaktif. Ada hubungan timbal balik antara pengirim pesan (tokoh, media, elite lokal) dan penerima (masyarakat). Isu politik uang menjadi “isu publik” ketika terjadi kesadaran kolektif bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai agama dan moral. Artinya, proses resistensi muncul karena ada komunikasi dua arah

yang intens dan berulang, yang akhirnya menginternalisasi norma antikorupsi dan keadilan sosial dalam kehidupan warga (Gilardi et al., 2022).

Sementara itu Stephen W. Littlejohn (2009) menjelaskan bahwa penentuan agenda berjalan dalam tiga komponen yang sebagai berikut:

1. Media harus disusun dengan cara tertentu. Proses ini akan menunjukkan bagaimana agenda media muncul pada awalnya.
2. Dalam berbagai aspek, agenda media berpengaruh atau berhubungan dengan agenda publik atau isu-isu tertentu yang penting bagi masyarakat. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh pengaruh media dapat mengubah agenda publik dan cara publik meresponsnya.
3. Agenda publik memengaruhi atau terlibat dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan berkaitan dengan pengembangan kebijakan publik yang dianggap krusial bagi masyarakat.

Adapun ditinjau dari segi proses penentuannya agenda dibagi menjadi tiga, yaitu (Efendi et al., 2023: 1716):

1. Penetapan agenda publik: Agenda publik berusaha untuk mengerti bagaimana media massa mempengaruhi opini masyarakat.
2. Penetapan agenda media: Penetapan agenda media merupakan penelitian yang fokus pada konten media yang terkait dengan definisi isu, seleksi, dan penekanan yang dilakukan oleh media.
3. Penetapan agenda kebijakan: Agenda kebijakan berhubungan dengan hubungan antara opini publik dan kebijakan para elite, keputusan, serta tindakan yang diambil.

Teori agenda setting secara praktis juga didasarkan pada dua prinsip fundamental. Prinsip *pertama* menyatakan bahwa media tidak hanya merefleksikan informasi kepada khalayak, tetapi juga menyaring dan membentuk apa yang kita lihat. Misalnya, berita yang kontroversial atau memalukan ditampilkan di bagian atas siaran sebagai pengganti berita terkini atau isu yang lebih berdampak, seperti ancaman badai atau perubahan undang-undang pajak. Adapun prinsip *kedua* menjelaskan bahwa lebih banyak perhatian yang diberikan media pada suatu isu, semakin besar kemungkinan masyarakat akan menganggap isu itu penting. Dengan cara lain untuk memandangnya: media massa tidak memberitahu kita apa yang seharusnya kita pikirkan atau bagaimana kita seharusnya merasa mengenai suatu cerita atau isu, tetapi mereka menghadirkan cerita atau masalah tertentu yang mendorong orang untuk memikirkannya lebih dalam.

Ada keuntungan psikologis dan ilmiah yang terkait dengan teori pengaturan agenda. Semakin sering sebuah cerita muncul di media massa, semakin mudah diingat oleh

individu ketika mereka diminta untuk mengenangnya, meskipun berita itu tidak langsung mempengaruhi mereka atau tidak dianggap sebagai masalah utama di pikiran mereka.

Adapun agenda yang bisa ditetapkan oleh media massa adalah (Arnold-Forster, 2023):

1. Apa yang seharusnya dipikirkan oleh masyarakat.
2. Menentukan informasi yang harus dianggap benar oleh masyarakat.
3. Menentukan solusi untuk suatu isu.
4. Menentukan fokus perhatian terhadap suatu isu.
5. Menentukan informasi yang perlu diketahui dan dilakukan oleh masyarakat.

Berlandaskan penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa Teori Agenda-Setting tidak hanya menjelaskan bagaimana media atau penggerak komunikasi mampu menentukan tema yang dianggap signifikan oleh masyarakat, tetapi juga menjelaskan proses penciptaan nilai, pandangan, dan perilaku sosial melalui komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Ketika suatu isu terus-menerus dibangun dan disebarkan oleh individu atau kelompok yang memiliki dukungan serta pengakuan di masyarakat, maka semakin besar kemungkinan isu itu terintegrasi dalam kesadaran kolektif dan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, teori ini menjadi kerangka yang tepat untuk menganalisis bagaimana komunikasi dapat membentuk budaya, menginternalisasikan nilai tertentu, serta mendorong munculnya sikap dan tindakan sosial yang sejalan dengan tujuan bersama.

Sinergi Teori Agenda-Setting dan Dakwah Sosial

Dakwah dalam konteks sosial bukan hanya kegiatan menyampaikan ajaran agama, tetapi juga bentuk komunikasi moral yang berfungsi membangun kesadaran sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut M. Natsir, dakwah merupakan seruan menuju kebaikan (amar ma'ruf nahi munkar) yang dilakukan secara hikmah dan komunikasi yang santun. Dakwah berperan membentuk opini publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam, termasuk dalam ranah sosial-politik (Natsir, 2003).

Dakwah yang efektif tidak hanya berisi ceramah, melainkan membangun dialog sosial yang menyentuh kesadaran kolektif masyarakat (Shodiqin, 2014). Dalam konteks politik uang, dakwah dapat menjadi media penyadaran moral yang menegaskan bahwa jual beli suara adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah publik. Oleh karena itu, komunikasi dakwah memiliki potensi besar dalam membentuk resistensi masyarakat terhadap politik uang, karena ia berbasis pada legitimasi moral dan spiritual yang kuat.

Sinergi antara teori Agenda-Setting dan pendekatan dakwah sosial menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dalam masyarakat religius. Jika teori Agenda-Setting menekankan pada pembentukan isu publik melalui komunikasi massa, maka dakwah

sosial menekankan pada pembentukan kesadaran moral melalui komunikasi interpersonal dan kelompok. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membentuk kesadaran politik yang etis.

Dalam konteks Desa Gerlang, peran tokoh agama dan masyarakat tidak hanya sebagai penyampai pesan moral, tetapi juga sebagai “media” yang menentukan arah perhatian publik. Melalui khutbah, pengajian, dan kegiatan sosial, mereka menempatkan isu “menolak politik uang” sebagai agenda utama yang perlu diperhatikan oleh warga. Dengan demikian, teori Agenda-Setting dapat menjelaskan bagaimana dakwah menjadi mekanisme komunikasi massa yang efektif di tingkat lokal.

Kondisi Sosial dan Keagamaan dan Resistensi Politik Uang pada Masyarakat Gerlang

Sebagai desa yang berada di tapal batas terakhir antara kabupaten Batang dan Banjarnegara (Wilayah Dataran Tinggi Dieng) Gerlang juga mempunyai tipologi geografis-geologis hampir sama dengan desa-desa Dieng yang tersebar di kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Keindahan landscape, dan kesuburan tanah juga menjadi anugerah yang dimiliki oleh desa Gerlang. Bukan hanya itu, dalam segi sosio-kultur-religi Gerlang yang secara administratif masuk ke dalam wilayah kabupaten Batang, namun nyatanya pada aspek ini lebih dekat dengan Dieng.

Pada aspek sejarah keislaman misalnya, bisa diruntut dengan melihat jaringan dakwah di kawasan dataran tinggi Dieng. Diketahui bahwa pada periode pasca Walisongo gerakan para Sayyid memang tidak lagi berada dalam naungan satu organisasi dakwah resmi tertentu. Namun penyebaran ajaran Islam tetap dilaksanakan dengan menggunakan dasar-dasar ideologi dan strategi yang telah diwariskan oleh Walisongo. Satu dari sekian upaya itu terjadi di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya (Wonosobo, Kawasan Seputaran Gunung Kendil (Batur dan sebagian Wilayah Kecamatan Blado –didalamnya Gerlang-). Sebagai salah satu pusat peradaban Hindu-Budha dengan tersebarnya situs-situs peribadatan peninggalan Wangsa Syailendra (Firmadhani & Syarif, 2021), menyebarkan agama di kawasan Dieng tentu wajib hukumnya menggunakan pendekatan kultural ala Walisongo. Sementara secara strategis-praktis itulah yang terjadi dan jejaknya bisa dilihat hingga sekarang. Ideologi dan praktik keislaman ala ahlusunnah wal jama'ah (menganut Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam sisi aqidah, Imam Syafi'i dalam bidang Fiqh, dan Imam Djunaid Al-Baghdadi serta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bidang tasawuf) (Ramdhan, 2018) itulah yang kini menjadi pegangan mayoritas warga di kawasan Dieng. Kekhasan kultural yang Nampak juga membuat mereka menjatuhkan pilihan pada Nahdhatul Ulama (NU) sebagai afiliasi resmi keberagamaan mereka. Oleh karenanya tidak mengherankan praktik-praktik kultural –semisal ruwat gimbal, kesenian lengger, dan sebagainya- masih bisa bertahan sebab kekhasan NU yang begitu akomodatif terhadap kebudayaan.

Kondisi keagamaan masyarakat sekitar Dieng saat ini memang menunjukkan adanya kesinambungan yang kuat dalam pewarisan ajaran Islam ala Walisongo. Salah satu tonggak penting kesinambungan ini terjadi pada abad ke-16 hingga ke-17, ketika para Sayyid seperti Syeikh Adam Sari (Mbah Sembung), Syeikh Ngabdullah Selomanik, dan Syeikh Karim mengabdikan diri dalam dakwah di kawasan Dieng. Ketiga tokoh ini diyakini memiliki garis keturunan yang tersambung kepada Rasulullah SAW.. Jaringan dakwah mereka juga berhubungan dengan tokoh lain, seperti Syeikh Panjalilun dan Kyai Abdullah Sajad Sikunang, meskipun asal-usul dan nasab kedua tokoh terakhir belum dapat dipastikan. Namun, keberhasilan jaringan para Sayyid ini dalam mewarisi dan melanjutkan ajaran Walisongo kepada generasi berikutnya tidak diragukan lagi. Hal ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat tantangan berat yang mereka hadapi dari religiusitas masyarakat Dieng yang saat itu masih kental dengan pengaruh Hinduisme dan Buddhisme (Hidayatullah, 2022).

Berdasarkan bukti sejarah berupa makam dan petilasan, ketiga Sayyid ini menandai masuknya Islam di dataran tinggi Dieng pada abad ke-16. Mengikuti pendekatan kultural Walisongo, mereka perlahan-lahan mengubah wajah Dieng yang sebelumnya erat dengan warisan Wangsa Syailendra menjadi komunitas Muslim yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah (Mubin, 2010). Pola dakwah ini juga berpengaruh pada masyarakat Gerlang, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam tradisi budaya mereka, seperti pada tarian “lengger”. Sebelum Islam, tarian “lengger” memiliki elemen hiburan yang diwarnai sesi “sawer” bernuansa negatif, yang identik dengan erotisme. Namun, setelah masuknya Islam, tradisi ini berubah menjadi tarian estetis tanpa elemen “sawer”, menyesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Ini mencerminkan ciri khas dakwah Walisongo yang toleran, moderat, dan akomodatif—mengubah substansi tanpa menghapus tradisi sepenuhnya.

Dalam aspek akidah, masyarakat Gerlang, sebagaimana masyarakat Dieng pada umumnya, mengikuti ajaran Imam Asy’ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam fiqih, mereka berpegang pada mazhab Syafi’i, dan dalam tasawuf mereka mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi serta Syeikh Abdul Qadir Jailani. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gerlang sangat teguh memegang ajaran yang diwariskan oleh para penyebar Islam di Dieng pada masa awal.

Meskipun demikian, beberapa wilayah di Dieng, seperti dusun-dusun di Desa Kepakisan yang berjarak sekitar 5 km dari Gerlang, mulai terlihat dipengaruhi oleh paham puritanisme (Salafi-Wahabi). Namun, fenomena ini baru muncul setelah era reformasi 1998 dan bukan merupakan bagian dari warisan awal pribumisasi Islam di Dieng. Hermanto & Hendriani (2020: 286) bahkan menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Dieng menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan warisan khas Walisongo. Pada periode 1930-an, hal ini diperkuat dengan keberadaan Kartu Tanda

Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama yang dimiliki oleh warga Dieng. Sebagaimana diketahui, NU merupakan organisasi Islam yang memiliki keterkaitan langsung dengan tradisi keilmuan dan garis keturunan Walisongo.

Selain menunjukkan kesinambungan historis penyebaran Islam, situasi sosial dan keagamaan di Gerlang juga mencerminkan proses penyesuaian Islam yang terjadi secara alami melalui pengintegrasian nilai-nilai syariah dengan budaya setempat. Dalam tinjauan dakwah kultural, keberhasilan penyebaran Islam di area ini tidak dinilai dari hilangnya tradisi lokal, tetapi lebih kepada bagaimana ajaran Islam dalam memberikan interpretasi baru terhadap budaya tersebut, sehingga budaya itu tetap terpelihara tanpa bertentangan dengan prinsip akidah dan syariah. Pendekatan transformasi ini menghasilkan pola keberagamaan yang menyeluruh, fleksibel, dan terfokus pada harmoni sosial. Oleh sebab itu, berbagai ritual kolektif, seni tradisional, dan tradisi pertanian di Gerlang hingga saat ini masih berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga sebagai media untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam yang diwariskan secara turun-temurun.

Di sisi lain, karakter religius masyarakat Gerlang tidak dapat dipisahkan dari adanya jaringan institusi Islam tradisional yang kuat di area Dieng dan sekitarnya, khususnya melalui majelis taklim, tradisi tahlil, manaqiban, dan perayaan hari-hari besar Islam yang menjadi tempat melanggengkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Lembaga sosial dan keagamaan ini berperan sebagai mekanisme untuk mentransfer pengetahuan serta sebagai benteng budaya dalam mempertahankan identitas keislaman masyarakat dari berbagai arus perubahan ideologi keagamaan yang muncul belakangan. Dengan begitu, dominasi corak Islam Nusantara di Gerlang bukanlah sekadar fenomena sosial, tetapi merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang, didukung oleh jaringan ulama dan praktik kebudayaan yang saling memperkuat sehingga membentuk identitas religius masyarakat yang unik dan berkelanjutan.

Desa Gerlang terletak di wilayah perbukitan Batang bagian selatan. Secara demografis, masyarakatnya didominasi oleh pemeluk Islam, dengan struktur sosial berbasis kekerabatan dan nilai gotong royong. Aktivitas keagamaan sangat tinggi, ditandai dengan maraknya majelis taklim, kegiatan masjid, serta partisipasi masyarakat dalam acara keagamaan. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, sehingga peran mereka seringkali melampaui urusan ritual menuju ranah sosial-politik.

Dalam Pilkades terakhir, fenomena yang menonjol adalah menurunnya praktik politik uang dibanding pemilihan sebelumnya. Beberapa warga menyebut bahwa adanya kesadaran kolektif untuk menolak “serangan fajar” merupakan hasil dari proses panjang penyadaran moral yang dilakukan para tokoh agama. Dalam forum-forum pengajian, para ustaz secara terbuka membahas dampak negatif politik uang terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Resistensi masyarakat terhadap politik uang di Desa Gerlang muncul sebagai hasil dari pembentukan “agenda sosial” melalui komunikasi publik. Dalam teori Agenda-Setting, isu yang dianggap penting oleh masyarakat tidak muncul secara spontan, melainkan hasil dari penonjolan (salience) yang dilakukan oleh “komunikator agenda” dan dalam hal ini tokoh agama dan pemimpin informal (Griffin et al., 2015).

Melalui khutbah Jumat, pertemuan warga, dan media lokal seperti grup WhatsApp desa, tokoh masyarakat menempatkan isu “menolak politik uang” sebagai topik yang terus diulang. Dalam waktu yang bersamaan, masyarakat mulai menginternalisasi nilai tersebut dan menganggap politik uang sebagai bentuk penyimpangan moral. Dengan demikian, resistensi bukan sekadar penolakan individu, melainkan konstruksi sosial yang terbangun melalui interaksi dan komunikasi berulang.

Dakwah sebagai Media Pembentukan Kesadaran Politik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dakwah di Desa Gerlang tidak lagi terbatas pada ajakan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup ajakan moral sosial-politik. Para ustaz menafsirkan nilai amanah dan keadilan dalam konteks pemilihan kepala desa, menegaskan bahwa memilih pemimpin karena uang sama dengan menggadaikan tanggung jawab moral.

Dalam perspektif teori Agenda-Setting, khutbah dan pengajian tersebut berfungsi sebagai agenda-building, yaitu tahap di mana aktor sosial membentuk persepsi publik terhadap isu tertentu (Griffin et al., 2015). Dakwah menjadi saluran komunikasi massa di tingkat lokal yang menyalurkan pesan moral dengan frekuensi tinggi, menjadikan isu “politik uang” menonjol dalam kesadaran masyarakat.

Selain komunikasi tatap muka, resistensi juga diperkuat melalui media sosial. Grup WhatsApp warga, yang awalnya digunakan untuk koordinasi kegiatan desa, menjadi ruang publik digital tempat isu politik uang dibahas secara terbuka. Tokoh masyarakat menggunakan ruang ini untuk menyebarkan pesan moral dan mengingatkan warga agar tidak tergoda dengan iming-iming uang.

Dalam perkembangan Teori Agenda-Setting generasi kedua, Maxwell McCombs menjelaskan bahwa media digital mampu mempercepat proses penyebaran dan penguatan suatu isu karena sifatnya yang interaktif, partisipatif, serta memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara luas (McCombs, 1997). Dalam konteks ini, media sosial desa dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk memperkuat pembentukan opini publik mengenai pentingnya penolakan terhadap praktik politik uang. Efektivitas tersebut semakin didukung oleh beberapa faktor, yaitu: Resistensi terhadap politik uang di Desa Gerlang ditopang oleh beberapa faktor:

1. Kesadaran religius masyarakat yang kuat;
2. Peran tokoh agama dan pemuda dalam membentuk opini publik;

3. Keterbukaan ruang komunikasi sosial, baik tatap muka maupun digital; dan
4. Modal sosial berbasis gotong royong yang menumbuhkan rasa malu terhadap praktik korupsi sosial.

Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk ekosistem komunikasi yang kondusif sehingga resistensi terhadap politik uang berkembang menjadi norma kolektif yang hidup di tengah masyarakat.

Akhirnya Analisis terhadap fenomena resistensi masyarakat Gerlang menunjukkan bahwa teori Agenda-Setting relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana isu moral dapat menjadi agenda publik di tingkat lokal. Dalam konteks ini, dakwah sosial berfungsi sebagai media alternatif yang menggantikan peran media massa formal. Tokoh agama dan masyarakat bertindak sebagai pembentuk agenda yang efektif, karena pesan yang mereka sampaikan memiliki otoritas moral dan kedekatan emosional dengan warga.

Dari perspektif dakwah, fenomena ini mencerminkan keberhasilan komunikasi yang bersifat transformasional, yakni komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat. Resistensi terhadap politik uang bukan sekadar hasil kampanye moral, melainkan proses komunikasi jangka panjang yang membangun kesadaran politik berbasis iman dan tanggung jawab sosial.

Dalam kerangka teori komunikasi massa, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa media sosial lokal berfungsi memperkuat agenda moral yang dibentuk oleh dakwah tatap muka. Terjadi sinergi antara komunikasi tradisional dan komunikasi digital dalam membangun opini publik yang antikorupsi. Fenomena ini menegaskan bahwa kekuatan komunikasi massa tidak hanya terletak pada media besar, tetapi juga pada jaringan sosial yang memiliki legitimasi kultural.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa resistensi masyarakat Gerlang terhadap politik uang merupakan hasil dari proses komunikasi sosial dan dakwah yang efektif dalam membentuk agenda moral publik. Tokoh agama dan masyarakat berperan sebagai pembentuk isu yang memengaruhi cara pandang warga terhadap praktik politik uang, sesuai dengan prinsip-prinsip teori Agenda-Setting. Proses resistensi ini diperkuat oleh sinergi antara dakwah tatap muka dan media sosial lokal, yang bersama-sama membentuk opini publik berbasis nilai agama dan etika sosial. Dengan demikian, resistensi masyarakat bukan semata produk kebijakan, melainkan hasil kesadaran komunikatif yang dibangun melalui nilai dakwah dan komunikasi publik yang terus-menerus. Penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi dalam memahami dinamika politik lokal dan memberikan pelajaran bahwa perubahan sosial dapat tumbuh dari bawah melalui kekuatan komunikasi yang dilandaskan pada moral/nurani masyarakat sendiri.

REFERENSI

- Arief, S., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1946>
- Arnold-Forster, T. (2023). Walter Lippmann and Public Opinion. *American Journalism*. <https://doi.org/10.1080/08821127.2022.2161665>
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitatif Inquiry and Research Design: Chosing among Five Approaches*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darma, Z. A. R. (2022). Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. In *Yogyakarta : Pustaka Pelajar*. <http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/BukuDinamikaPolitikUangdalamPemilihanKepalaDaerah.pdf>
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori Agenda Setting. *Junral Pendidikan Tambusai*.
- Firmadhani, A. A., & Syarif, M. I. (2021). KAJIAN ORNAMEN PADA KELOMPOK CANDI ARJUNA DI KOMPLEKS CANDI DIENG. *Imajinasi: Jurnal Seni*, XV(2).
- Gilardi, F., Gessler, T., Kubli, M., & Müller, S. (2022). Social Media and Political Agenda Setting. *Political Communication*. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1910390>
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2015). Edition, A First Look at Communication Theory 10th. In *McGraw-Hill Education*.
- Hermanto, H., & Hendriani, A. S. (2020). Konsep Islam Yang Mendasari Pembentukan Desa Desa Di Pegunungan Dieng. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(3), 266–274. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i3.1348>
- Hidayatullah, A. (2022). Jejak Kaum Sayyid dalam Pribumisasi Islam di Dieng. *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v2i02.6087>
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2009). Encyclopedia Communication Theories. In *Family Communication*.
- McCombs, M. (1997). New frontiers in agenda setting: Agendas of attributes and frames. *Mass Communication Review*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Miles and Huberman 1994.pdf. In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Mubin, N. (2010). *Potret Akulturasi Islam, Hindu, dan Kearifan Lokal Masyarakat Dataran Tinggi Dieng*. Yogyakarta: Pustaka Prisma.
- Natsir, M. (2003). *Fiqhud Dakwah*. Malang: Media Dakwah- STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang.
- Ramadhan, T. W. (2018). Islam Nusantara : Pribumisasi Islam ala NU. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3333>

Shaw, D. L., & McCombs, M. E. (1977). The emergence of American political issues: The agenda-setting function of the press. *West Publishing Co.*

Shodiqin, A. (2014). Reposisi Muballigh: Dari 'Personal' Menuju 'Agent of Change.' *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*.
<https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i2.343>